

ANALYSIS OF THE EFFECT OF LOCAL OWN-SOURCE REVENUE (PAD) AND CAPITAL EXPENDITURE ON ECONOMIC GROWTH IN GORONTALO PROVINCE

Yusran Zainuddin¹, Rismanto², Firman Ali³

^{1,2}IAIN Sultan Amain Gorontalo, ³Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makasar Bongaya

e-mail: yusranzainuddin@iaingorontalo.ac.id, rizmanalfarizi@gmail.com,

firmanaliawho@gmail.com

*Yusran Zainuddin

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of Regional Original Revenue (PAD) and Capital Expenditure (BM) on Economic Growth as measured by Gross Regional Domestic Product (GRDP) in Gorontalo Province during the 2018-2023 period. The secondary data used was obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS) and local government financial reports. The analysis method used is multiple linear regression to measure the significant contribution of PAD and BM to the variability of GRDP. The results of the analysis show that PAD has a positive and significant influence on GRDP, with any increase in PAD driving regional economic growth. In contrast, BM shows a negative and significant influence on GRDP, which may be due to inefficient or untargeted allocation and use of capital expenditure. With an R Square value of 0.929, the model is very good at explaining variations in GRDP. This study suggests the importance of effective PAD management as well as in-depth evaluation of BM allocation to ensure positive contribution to economic growth in Gorontalo Province. With the right strategy, it is expected that regional economic growth can continue to increase, providing a positive impact on development and community welfare.

Keywords: PAD, BM, GRDP, Economy

Article History: 15 Nov 2024

Article submission: 30 Nov 2024

Article revision: 5 Des 2024

Article acceptance: 16 Des 2024

I. INTRODUCTION

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah [1]. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kapasitas suatu daerah dalam memanfaatkan sumber dayanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan [2].

Pemerintah Daerah memiliki peran yang semakin signifikan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi di wilayahnya. Perubahan dalam



pengelolaan keuangan pemerintah Indonesia telah mengarah pada desentralisasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, yang kemudian memicu transformasi daerah menjadi otonom. Proses ini diinisiasi dengan lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah [4]. Dengan desentralisasi, pemerintah daerah kini memiliki motivasi kuat untuk merancang, mendebatkan, dan menerapkan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah masing-masing. Desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan serta distribusi hasil pembangunan yang lebih merata dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi lokal. Salah satu sumber pendanaan utama bagi Pemerintah Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal yang berpengaruh terhadap perekonomian daerah [5].

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal merupakan dua elemen penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang berperan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi [6]. Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, memberikan pemerintah daerah kemampuan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik tanpa harus bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pemerintah pusat. Di sisi lain, Belanja Modal mencakup pengeluaran pemerintah daerah untuk pembelian barang-barang modal yang dimaksudkan untuk menambah aset tetap atau inventaris daerah yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Belanja ini sering kali diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi [7].

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting yang mencerminkan peningkatan output ekonomi suatu daerah. Peningkatan ini diharapkan membawa dampak positif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk peningkatan pendapatan, penurunan tingkat pengangguran, dan perbaikan infrastruktur [8]. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti oleh pemerataan pembangunan dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Kondisi ekonomi suatu negara dapat diperkirakan dengan melihat perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB)



daerahnya dari waktu ke waktu. PDB ini mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dan merupakan salah satu indikator utama dalam mengevaluasi kondisi ekonomi suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Selain itu, melihat beberapa pos anggaran belanja terbesar di daerah tersebut juga dapat menjadi indikator penting dalam menilai kondisi keuangan suatu wilayah secara keseluruhan [9].

Provinsi Gorontalo, sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia, memiliki tantangan dan peluang tersendiri dalam mengelola PAD dan belanja modal untuk pertumbuhan perekonomian daerahnya. Sebagai provinsi yang masih relatif muda sejak pemekarannya dari Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2000, Gorontalo menghadapi berbagai kendala struktural dan administratif yang mempengaruhi pengelolaan PAD dan Belanja Modal. Meskipun Gorontalo memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, masih terdapat kendala dalam hal infrastruktur dan pengelolaan sumber daya yang optimal. Pemanfaatan PAD dan Belanja Modal yang efektif diharapkan mampu mempercepat pembangunan ekonomi di provinsi Gorontalo.

Studi ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana PAD dan belanja modal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan fiskal daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi di Gorontalo.

II. LITERATURE REVIEW

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendanaan utama bagi pemerintah daerah yang diperoleh dari berbagai aktivitas ekonomi di dalam wilayahnya sendiri. Konsep PAD diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. PAD meliputi beragam jenis penerimaan, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [10].



Pajak daerah merupakan salah satu komponen utama dalam PAD. Pemerintah daerah dapat mengenakan berbagai jenis pajak, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan lain sebagainya, sesuai dengan kebutuhan dan potensi ekonomi wilayahnya. Selain itu, retribusi daerah juga menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah daerah. Retribusi ini dikenakan atas pelayanan atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atau pihak tertentu, seperti retribusi pelayanan pasar, retribusi izin mendirikan bangunan, dan sebagainya. Melalui penerimaan pajak dan retribusi, pemerintah daerah dapat menghasilkan pendapatan yang diperlukan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik [11].

Selain pajak dan retribusi, PAD juga dapat diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hal ini meliputi pendapatan yang berasal dari pengelolaan aset daerah, seperti hasil sewa atau penjualan tanah dan bangunan, pendapatan dari pengelolaan sumber daya alam, dan lain sebagainya. Dengan memanfaatkan potensi ekonomi lokal dan mengelola kekayaan daerah dengan baik, pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan PAD untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Oleh karena itu, pengelolaan PAD yang efektif dan transparan sangat penting bagi terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan merata di tingkat daerah [12].

2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan salah satu komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang ditujukan untuk memperoleh aset tetap yang memiliki manfaat jangka panjang. Aset tetap ini meliputi berbagai macam pembangunan fisik yang dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas umum di suatu wilayah. Contohnya termasuk pembangunan jalan, jembatan, gedung-gedung publik, serta pembelian peralatan atau mesin untuk keperluan pemerintahan daerah [13].

Pengeluaran dalam belanja modal memiliki tujuan strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup



masyarakat. Misalnya, pembangunan infrastruktur transportasi yang memadai dapat memperlancar arus barang dan orang, sehingga meningkatkan konektivitas antarwilayah dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Begitu juga dengan pembangunan fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan pusat perbelanjaan yang memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pusat perdagangan [14].

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi mencakup peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu. Hal ini bisa diukur dengan berbagai indikator, seperti Produk Domestik Bruto (PDB), yang merupakan nilai total semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam satu periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemajuan suatu negara atau daerah dalam meningkatkan produksi dan pendapatan, yang pada gilirannya dapat memperbaiki standar hidup masyarakatnya [15].

Pertumbuhan ekonomi tidak hanya mencakup peningkatan dalam sektor manufaktur, tetapi juga melibatkan pertumbuhan dalam sektor jasa, pertanian, dan lainnya. Dalam konteks daerah atau provinsi, pertumbuhan ekonomi sering kali diukur dengan pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB mencerminkan nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi yang dilakukan di suatu wilayah, dan pertumbuhan PDRB menunjukkan peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi ekonomi daerah tersebut [16].

Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan penting untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan ekonomi yang tepat dari pemerintah, investasi dalam infrastruktur, promosi investasi, dan pembangunan sumber daya manusia merupakan faktor-faktor yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, sebuah daerah



memiliki potensi untuk meningkatkan taraf hidup penduduknya, memberikan layanan publik yang lebih baik, serta mengurangi ketimpangan ekonomi di antara masyarakatnya [17].

III. METHODS

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini melibatkan pengumpulan dan analisis data sekunder terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal (BM), dan Pertumbuhan Ekonomi yang diukur dengan pertumbuhan PDRB Provinsi Gorontalo dari tahun 2018 hingga 2023. Data tersebut diperoleh dari sumber resmi, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk menganalisis pengaruh PAD dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi, digunakan metode analisis regresi berganda. Analisis regresi ini bertujuan untuk mengukur seberapa signifikan kontribusi PAD dan belanja modal terhadap variabilitas pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo.

IV. RESULTS

1. Data Penelitian

Data penelitian ini diperoleh dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo yang mencakup periode 2018-2023. Variabel-variabel utama yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal (BM), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data penelitian ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 1. Data Penelitian PAD, BM, dan PDRB 2018-2023

Tahun	PAD (Juta Rupiah)	BM (Juta Rupiah)	PDRB (Miliar Rupiah)
2018	370394.296	309299.594	26719.27
2019	422313.809	308071.977	28429.97
2020	461928.721	307180.563	28425.38
2021	405055.721	149095.156	29107.91
2022	446441.807	110498.488	30284.29
2023	778132	196345	31647.60



Data penelitian yang digunakan dalam analisis ini mencakup tiga variabel utama yang diamati selama periode 2018-2023 di Provinsi Gorontalo, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal (BM), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selama periode tersebut, PAD menunjukkan tren yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat secara keseluruhan. Pada tahun 2018, PAD tercatat sebesar 370.394 juta Rupiah, kemudian meningkat menjadi 422.314 juta Rupiah pada tahun 2019 (peningkatan sekitar 14%). Pada tahun 2020, PAD terus meningkat menjadi 461.929 juta Rupiah (peningkatan sekitar 9%). Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 405.056 juta Rupiah (penurunan sekitar 12%). Tren kembali meningkat pada tahun 2022 dengan PAD sebesar 446.442 juta Rupiah (peningkatan sekitar 10%), dan peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan PAD mencapai 778.132 juta Rupiah (peningkatan sekitar 74%).

Belanja Modal (BM) juga mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun selama periode tersebut. Pada tahun 2018, BM tercatat sebesar 309.300 juta Rupiah, dan sedikit menurun menjadi 308.072 juta Rupiah pada tahun 2019 (penurunan sekitar 0,4%). Tren penurunan berlanjut pada tahun 2020 dengan BM sebesar 307.181 juta Rupiah (penurunan sekitar 0,3%). Penurunan tajam terjadi pada tahun 2021 dengan BM turun menjadi 149.095 juta Rupiah (penurunan signifikan sekitar 51%) dan berlanjut pada tahun 2022 dengan BM sebesar 110.498 juta Rupiah (penurunan sekitar 26%). Namun, pada tahun 2023, BM kembali meningkat menjadi 196.345 juta Rupiah (peningkatan sekitar 78%).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan peningkatan secara konsisten selama periode 2018-2023, meskipun ada sedikit stagnasi antara tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2018, PDRB tercatat sebesar 26.719,27 miliar Rupiah dan meningkat menjadi 28.429,97 miliar Rupiah pada tahun 2019 (peningkatan sekitar 6%). Namun, pada tahun 2020, PDRB sedikit menurun menjadi 28.425,38 miliar Rupiah. Tren positif kembali terlihat pada tahun 2021 dengan PDRB mencapai 29.107,91 miliar Rupiah (peningkatan sekitar 2,4%). Pertumbuhan berlanjut pada tahun 2022 dengan PDRB sebesar 30.284,29 miliar Rupiah (peningkatan sekitar 4%) dan pada tahun 2023 mencapai 31.647,60 miliar Rupiah (peningkatan sekitar 5%).



2. Pengaruh PAD dan BM terhadap PDRB

Pengujian dilakukan menggunakan SPSS dengan hasil pengujian sebagai berikut.

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	BM, PAD ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: PDRB

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.964 ^a	.929	.882	585.42097

a. Predictors: (Constant), BM, PAD

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	13436611.00	2	6718305.501	19.603	.019 ^b
	Residual	1028153.152	3	342717.717		
	Total	14464764.15	5			

a. Dependent Variable: PDRB

b. Predictors: (Constant), BM, PAD

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	27596.200	1238.806		22.276	.000
	PAD	.008	.002	.697	4.421	.021
	BM	-.010	.003	-.531	-3.367	.043

a. Dependent Variable: PDRB

Gambar 1. Pengujian Regresi Linier PAD dan BM Terhadap PDRB

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang dilakukan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal (BM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di Provinsi Gorontalo, ditemukan bahwa model regresi ini memiliki korelasi yang sangat kuat, dengan nilai R sebesar 0.964. Nilai R Square sebesar 0.929 menunjukkan bahwa 92.9% variasi dalam PDRB dapat dijelaskan oleh variabel PAD dan BM, yang mengindikasikan bahwa model ini sangat baik dalam menjelaskan variasi PDRB. Adjusted R Square yang hanya sedikit lebih rendah, yaitu sebesar 0.882, menegaskan bahwa penyesuaian untuk jumlah variabel dalam model tetap menunjukkan kemampuan penjelasan yang tinggi.

Analisis varians (ANOVA) menunjukkan bahwa model regresi ini signifikan secara statistik, dengan nilai F sebesar 19.603 dan nilai signifikansi (p-value) sebesar

0.019. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, PAD dan BM secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PDRB.

Interpretasi koefisien regresi menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Koefisien PAD sebesar 0.008 dengan nilai t sebesar 4.421 dan p -value sebesar 0.021 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 unit dalam PAD akan meningkatkan PDRB sebesar 0.008 unit, dengan tingkat signifikansi yang sangat tinggi. Sebaliknya, koefisien BM menunjukkan nilai negatif sebesar -0.010, dengan nilai t sebesar -3.367 dan p -value sebesar 0.043, yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 unit dalam BM akan mengurangi PDRB sebesar 0.010 unit. Pengaruh BM signifikan secara statistik, yang berarti perubahan dalam BM memberikan dampak yang berarti terhadap PDRB dalam model ini.

Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa PAD dan BM merupakan faktor yang sangat berpengaruh dan signifikan dalam meningkatkan PDRB di Provinsi Gorontalo. PAD memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap PDRB, menunjukkan bahwa peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain, BM memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap PDRB, yang menunjukkan bahwa alokasi belanja modal perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Provinsi Gorontalo disarankan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan PAD dan mengoptimalkan kebijakan untuk meningkatkan PDRB. Evaluasi terhadap alokasi belanja modal sangat diperlukan agar dana yang dikeluarkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan untuk mengalokasikan belanja modal ke sektor-sektor yang lebih produktif dan memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Hasil dari interpretasi data menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal (BM), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo, namun dengan pengaruh yang berbeda-beda. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, yang menunjukkan bahwa peningkatan dalam PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal



ini mengindikasikan bahwa pengelolaan dan pengumpulan PAD yang efektif dan efisien sangat penting untuk meningkatkan PDRB di Gorontalo. Dengan meningkatnya PAD, pemerintah daerah memiliki lebih banyak sumber daya untuk mendanai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang dapat mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebaliknya, Belanja Modal (BM) menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap PDRB. Koefisien regresi BM yang negatif menunjukkan bahwa setiap peningkatan dalam BM justru mengurangi PDRB. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti efisiensi yang kurang optimal dalam pengalokasian dan penggunaan dana belanja modal, atau belanja modal yang tidak tepat sasaran. Penurunan tajam dalam BM pada tahun 2021 dan 2022 juga menandakan adanya perubahan dalam prioritas pengeluaran pemerintah daerah atau adanya kendala dalam pelaksanaan proyek-proyek modal. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap alokasi belanja modal untuk memastikan bahwa dana yang dikeluarkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah perlu mengidentifikasi sektor-sektor yang lebih produktif dan memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memastikan bahwa investasi dalam belanja modal diarahkan pada proyek-proyek yang benar-benar memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sendiri menunjukkan peningkatan yang stabil selama periode 2018-2023, meskipun ada sedikit stagnasi pada tahun 2020. Peningkatan PDRB yang konsisten ini mencerminkan adanya pertumbuhan output ekonomi di Provinsi Gorontalo. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun PAD meningkat, belanja modal yang tidak efektif dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan PAD harus diimbangi dengan evaluasi dan peningkatan efisiensi dalam pengalokasian belanja modal untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

V. CONCLUSION AND SUGGESTION

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal (BM) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo. Analisis regresi



linier menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang mengindikasikan bahwa peningkatan PAD secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini menegaskan pentingnya pengelolaan dan pengumpulan PAD yang efektif dan efisien, sehingga pemerintah daerah dapat memperoleh sumber daya yang memadai untuk membiayai program-program pembangunan dan pelayanan publik. Sebaliknya, Belanja Modal (BM) menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap PDRB, yang mungkin disebabkan oleh alokasi dan penggunaan belanja modal yang kurang efisien atau tidak tepat sasaran. Penurunan tajam dalam BM pada tahun 2021 dan 2022 juga mengindikasikan adanya kendala dalam pelaksanaan proyek-proyek modal atau perubahan dalam prioritas pengeluaran pemerintah daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Provinsi Gorontalo untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap alokasi belanja modal, memastikan bahwa dana yang dikeluarkan benar-benar diarahkan pada proyek-proyek yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Secara keseluruhan, penelitian ini menyarankan agar pemerintah Provinsi Gorontalo terus meningkatkan efisiensi pengelolaan PAD, mengoptimalkan kebijakan untuk meningkatkan PDRB, dan melakukan evaluasi mendalam terhadap alokasi belanja modal. Dengan strategi yang tepat dan implementasi yang efektif, diharapkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo dapat terus meningkat, memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

VI. BIBLIOGRAPHY

- [1] H. C. Rahayu, "Analisis Kesejahteraan Masyarakat terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia," *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, pp. 77–85, 2023.
- [2] R. Siregar and M. S. A. Majid, "Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam," *Jurnal EMT KITA*, vol. 7, no. 1, pp. 71–82, 2023.
- [3] I. F. Ismail, E. N. Walewangko, and J. I. Sumual, "Analisis Kesejahteraan Masyarakat terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, vol. 21, no. 3, 2021.
- [4] S. Lestari and Z. A. Suarja, "BLUE EKONOMI: DAMPAK PERENCANAAN ANGGARAN TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN," *JOURNAL OF ECONOMIC SCIENCE (JECS)*, vol. 9, no. 1, pp. 27–38, 2023.
- [5] L. J. Sema and A. Riduwan, "Analisis Flypaper Effect Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, vol. 10, no. 5, 2021.



- [6] A. Laodini, I. P. F. Rorong, and S. Y. Tumangkeng, "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Utara Tahun 2010-2021," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, vol. 23, no. 6, pp. 217–228, 2023.
- [7] D. Damanik, P. D. Panjaitan, and S. S. Siallagan, "PENGARUH PERTUMBUHAN PENDUDUK, TENAGA KERJA, INVESTASI, BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SUMATERA UTARA," *Jurnal KAFEBIS*, vol. 1, no. 1, pp. 36–48, 2023.
- [8] R. Imanto, M. Panorama, and R. Sumantri, "Pengaruh Pengangguran dan Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan.," *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 11, no. 2, pp. 118–139, 2020.
- [9] M. M. Ahmad, *Ekonomi Pembangunan*. Berkah Aksara Cipta Karya, 2024.
- [10] G. Gustini, A. Azuwandri, S. Salehan, and M. B. E. Putra, "Pengaruh Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rejang Lebong," *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, vol. 11, no. 2, pp. 1695–1706, 2023.
- [11] R. Triarda and R. Damayanti, "Analisis Optimalisasi Potensi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang," *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, vol. 6, no. 1, pp. 35–54, 2021.
- [12] A. Suparta, "Pengaruh Realisasi Pendapatan Aset Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur," *Kindai*, vol. 17, no. 1, pp. 55–64, 2021.
- [13] S. T. B. Ginting, "Pengaruh Belanja Modal Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi," 2021.
- [14] A. Palilu, *Pembangunan infrastruktur transportasi terhadap produk domestik regional bruto*. CV. Azka Pustaka, 2022.
- [15] M. T. P. Mukti and S. Soraya, "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kemiskinan dan Tenaga Kerja," *JSN: Jurnal Sains Natural*, vol. 2, no. 2, pp. 25–28, 2024.
- [16] A. Rahim, D. R. D. Hastuti, and A. Malik, *Pembangunan Ekonomi Biru di Indonesia*. Penerbit NEM, 2024.
- [17] N. Hasanah, "Perekonomian Indonesia Khususnya Pada Tingkat Makro," *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, vol. 2, no. 2, pp. 280–286, 2024.
- [18] H. Y. Sembiring, E. Purba, and D. G. Purba, "Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Samosir," *Jurnal Ekuilnomi*, vol. 6, no. 1, pp. 103–113, 2024.
- [19] J. Jamaruddin and S. Sudirman, "Dimensi Pengukuran Kualitas Hidup Di Beberapa Negara," *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, vol. 4, no. 1, pp. 51–63, 2022.
- [20] R. A. Mulia and R. P. Putri, "Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, vol. 2, no. 1, pp. 22–33, 2022.